PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

2024

DAFTAR ISI

		Hal
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Latar Belakang	**1**
	1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	**2**
	1.3. Susunan Organisasi	**3**
	1.4. Struktur Organisasi	**4**
	1.5. Permasalahan Utama *(Strategic Issuedd)* yang di hadapi Organisasi	**6**
	1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	**6**
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	**8**
	2.1. Rencana Strategis	**8**
	2.2. Perjanjian Kinerja	**10**
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	**12**
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	**12**
	3.1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	**34**
	3.1.2 Analisis Efisiensi Penggunaaan Sumber Daya	**71**
	3.2. Realisasi Anggaran	**72**
BAB VI	**PENUTUP**	**74**

KATA PENGANTAR

Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 4 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

RUSDIANTO, S.IP MM.
Pembina Utama Muda/NIP. 19640402 198602 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yang dihasilkan di tahun 2023 sebagai berikut :

- Tujuan

  Tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yakni *"Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah"* dengan indikator tujuan (a) *"Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah"* dengan target tahun 2023 sebesar BB (63,10) dan realisasi BB (63,28); (b) *"Indeks Inovasi Daerah"* dengan target tahun 2023 Sangat Inovatif (66) dan realisasi Sangat Inovatif (63,28)

- Sasaran

  Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yakni :

  (a) *"Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah"*, dengan indikator kinerja *"Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah"* dengan target tahun 2023 sebesar 73% dan realisasi sebesar 68,75% dengan capaian 94,18%

  (b) *"Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan"*, dengan indikator kinerja "*Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan*

kemiskinan" dengan target tahun 2023 sebesar 96,37% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian 103,77%

(c) *"Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting"* dengan indikator kinerja *"Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting"* dengan target tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%

- Indikator kinerja *"Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah"* terdiri atas indikator makro daerah, yakni : Laju Pertumbuhan Ekonomi (Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum); (Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, IKLH); PDRB Perkapita (Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)); Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Prevalensi Stunting); Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Angka PPKS, Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di masjid, Persentase Pemajuan Kebudayaan); Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Opini BPK, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat); Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, Indeks Pemberdayaan Gender)
- Indikator Kinerja *"Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan"* terdiri dari beberapa 7 (tujuh) OPD yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pangan dan Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

- Indikator Kinerja *"Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting"* terdiri dari beberapa 12 (dua belas) OPD yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Kepala OPD untuk menyampaikan Laporkan Akuntabilitas Kinerjanya kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertangungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2023 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, maka BAPPEDA Kota Padang Panjang berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2023, sesuai dengan Perubahan Anggaran Tahun 2023.

LKjIP BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2023 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

Maksud penyusunan LKjIP BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah memberikan informasi yang akuntabel dan transparan mengenai pertanggungjawaban keberhasilan BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pencapaian dari penetapan kinerja pada tahun 2023, yang dilaksanakan melalui kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai perwujudan akutabilitas BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang mempunyai dua kedudukan, yakni :

1. BAPPEDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
2. BAPPEDA sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala BAPPEDA mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan, terdiri dari:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data dan Informasi Pembangunan.
4. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Manusia;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sosial Budaya; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur, terdiri dari :
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknologi dan Inovasi Daerah;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur.
7. UPT.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, BAPPEDA Kota Padang Panjang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang personil yang terdiri atas; 5 (lima) orang PNS Golongan IV, 24 (dua puluh empat) orang PNS Golongan III, 2 (dua) orang PNS Golongan II, 1 orang P3K, dan 7 (tujuh) orang THL.

1.4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG

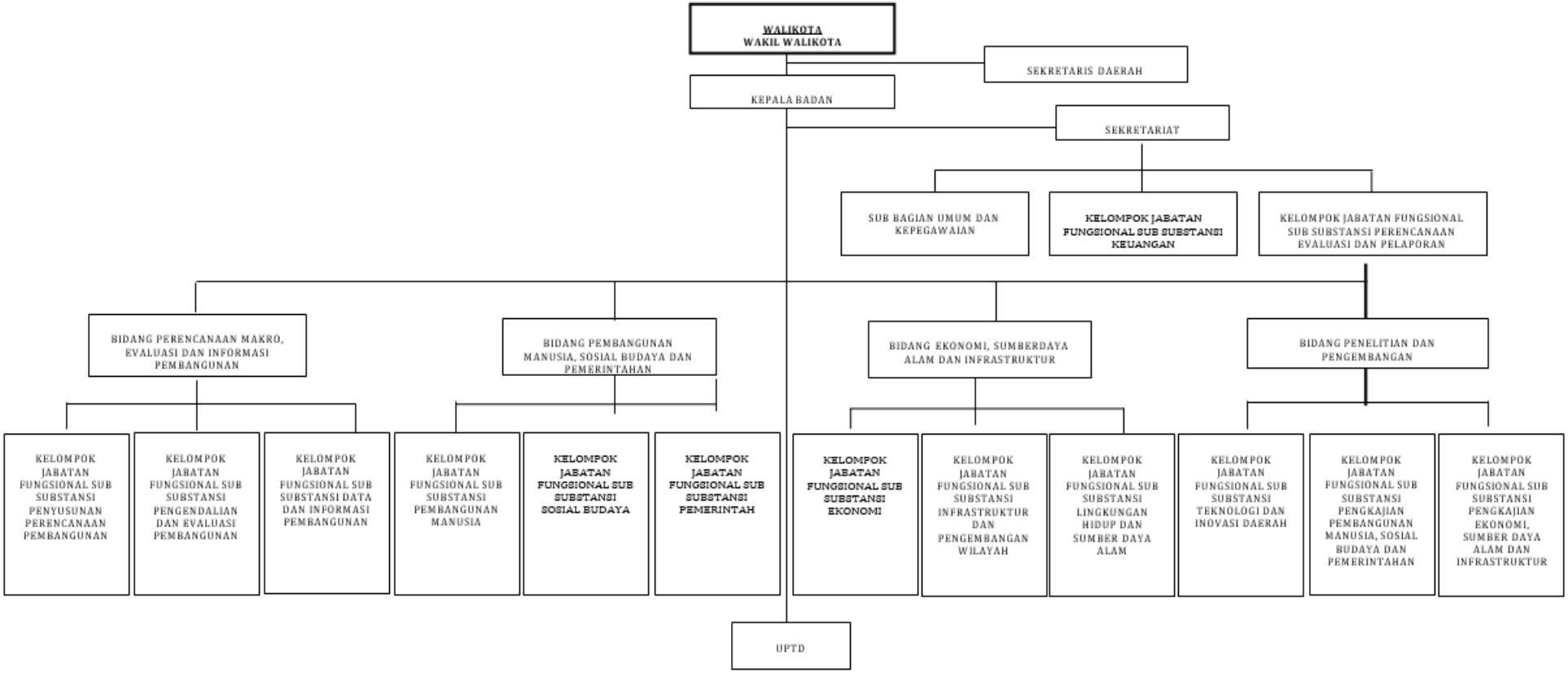

1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issuedd) yang di hadapi Organisasi

Isu Strategis merupakan kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar dan optimal;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan di daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
b. Realisasi Anggaran, Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran sampai kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Padang Panjang untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Padang Panjang 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan BAPPEDA Kota Padang Panjang periode 2018-2023 adalah sebagai berikut : ”Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, (2) Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, (3) Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting. Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator kinerja masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut, berdasarkan Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke		
				2019	2020	2021	2022	2023				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	B (61,20)	B (62,30)	BB (63,10)
											Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (62)	Sangat Inovatif (65)	Sangat Inovatif (66)
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	70 %	74 %	78 %	82 %	85 %		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	71 %	72 %	73 %
2.									Menurunnya Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	5,92 %	5,79 %	5,65 %
										Meningkatkan kon-sistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase kon-sistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	93 %	95 %	96,37 %
3.									Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Prevalensi Stunting	16,52 %	15,51 %	13,98 %
										Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	90 %	91,7 %	100 %

Dari tabel tujuan dan sasaran Bappeda Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 mengalami perubahan yang cukup signifikan yakni, tujuan dan sasaran yang awalnya hanya 1 tujuan dengan 1 sasaran, berubah menjadi 3 tujuan dengan 3 sasaran. Hal tersebut terjadi karena Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 20218-2023, dimana untuk pencapaian sasaran kota harus diturunkan kepada OPD, dimana Bappeda melaksanakan koordinasi program penanggulangan kemiskinan dan koordinasi program penurunan stunting maka tujuan dan sasaran harus di tambahkan pada Renstra Perubahan Bappeda Kota Padang Panjang tahun 2018-2023.

2.2. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2023 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2023 mengalami perubahan target dari pada Renstra Perubahan Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, yakni sasaran strategis (2) Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, target Renstra untuk tahun 2023 sebesar 95% namun realisasi tahun 2022 sebesar 96,37%, dan sasaran strategis (3) Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting, target Renstra untuk tahun 2023 sebesar 93% namun realisasi tahun 2022 sebesar 100%. Perubahan tersebut terjadi karena target tahun 2023 tidak boleh dibawah realisasi tahun 2022.

Tabel 2.2.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	73%	73%
2	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	96.37%	96.37%
3	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	100%	100%

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	399,315,950	340,502,800	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	153,305,850	101,797,050	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	124,359,150	50,039,750	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,506,494,170	5,351,268,003	

Untuk Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023, pada Perjanjian Kinerja Perubahan tidak ada perubahan target kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Tupoksi BAPPEDA Kota Padang Panjang seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya dan sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2022, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada BAPPEDA Kota Padang Panjang dicapai dengan 3 sasaran yakni :

1. ***Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah***
2. ***Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan***
3. ***Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting***

Target evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja sasaran yakni, persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah untuk tahun 2022 ditargetan sebesar 74%.

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja BAPPEDA
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	73%	68,75%	94,18%
2.	Meningkatkan kon-sistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	96,37%	100,00%	103,77%
3.	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber Data : BAPPEDA, Sebagian besar Data Sasaran Daerah tahun 2023 belum keluar

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, realisasi dan capaian tahun 2023 pada BAPPEDA Kota Padang Panjang, karena untuk menghitung Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah diperlukan data -data indikator makro daerah yang berasal dari OPD dilingkup Pemerintah Kota Padang Panjang dan Badan Pusat Statistik Padang Panjang. Data indikator makro rilis sebagian besar di bulan April 2024. Maka dari itu sebagian besar memakai data tahun lalu. Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah di formulasikan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

$$= \frac{\sum \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right)}{\text{Jumlah Indikator}}$$

Ket : Jumlah persentase capaian indikator sasaran daerah terhadap target tahun ke -n / jumlah indikator sasaran daerah

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Daerah pada Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
I.	**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**						
T1.	**Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan**	1	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**4,91**	**4,39 ***	**89,41%**	*Data tahun 2022*
S1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,75	5,54 *	96,35%	*Data tahun 2022*
		1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	4,75	5,28 *	111,16%	*Data tahun 2022*
		1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,7	2,4 *	64,86%	*Data tahun 2022*
		1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,78	10,47 *	134,58%	*Data tahun 2022*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	1.2.1	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	1,50	-0,03 *	-2,00%	*Data tahun 2022*
		1.2.2	IKLH	72,87	66,61 *	91,41%	*Data tahun 2022*
T2	**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**	2.	**PDRB Perkapita**	**48,01**	**47,49 ***	**98,92%**	*Data tahun 2022*
S3.	Menurunnya Angka Kemiskinan	2.3.1	Indeks Gini	0,306	0,296 *	103,38%	*Data tahun 2022*
		2.3.2	Tingkat Kemiskinan	4,69	5,24	89,50%	
S4.	Menurunnya Angka Pengangguran	2.4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,69	4,84 *	92,36%	*Data tahun 2022*
S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	2.5.1	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	11,11	11,153 *	100,39%	*Data tahun 2022*
II.	**MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN KUALITAS DAYA SAING SDM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA**						
T3	**Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Yang Sehat, Berakhlak dan Unggul**	3.	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**78,64**	**79,26**	**100,79%**	
S6	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	3.6.1	Rata-Rata Lama Sekolah	12,28	11,94	97,23%	
		3.6.2	Harapan Lama Sekolah	15,08	15,29	101,39%	
S7	Meningkatnya Derajat Kesehatan	3.7.1	Angka Harapan Hidup	72,94	73,23	100,40%	
		3.7.2	Prevalensi Stunting	13,98	16,08 *	83,21%	*Data tahun 2022*
T4.	**Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Agamais**	4.	**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Aman (92,57)**	**Aman (88,78) ***	**95,91%**	*Data tahun 2022*
S8	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.8.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100 *	100,00%	*Data tahun 2022*
S9	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	4.9.1	Angka PPKS	5,56	5,68 *	97,89%	*Data tahun 2022*
S10.	Meningkatnya aktivitas keagamaan dimasyarakat	4.10.1	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di masjid	100	100 *	100,00%	*Data tahun 2022*
		4.10.2	Persentase Pemajuan Kebudayaan	78	65,45 *	83,91%	*Data tahun 2022*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III	**MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, INOVATIF DAN PARTISIPATIF**						
T5	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**	5	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**59,5**	**59,4 ***	99,83%	*Data tahun 2022*
S11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	5.11.1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (63,10)	B (63,28)	100,29%	
		5.11.2	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%	
		5.11.3	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (66)	Sangat Inovatif (63,28)	95,88%	
		5.11.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,09 (Sangat Baik)	96,09 (Sangat Baik) *	100,00%	*Data tahun 2022*
T6	**Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan**	**6**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**4,59**	**4,6 ***	**100,22%**	*Data tahun 2022*
S 12	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	5.12.1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	95%	96,67 *	100,01%	*Data tahun 2022*
S13	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	5.13.1	Indeks Pemberdayaan Gender	70,84	69,44 *	98,02%	*Data tahun 2022*

Sumber Data : BAPPEDA, Data Olahan Tahun 2023, (*) Data Tahun 2022 karena Data Tahun 2023 belum dikeluarkan oleh Instansi berwenang

Untuk sasaran "Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah" di dukung oleh semua semua program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang. Pagu anggaran pada Bappeda senilai Rp. 5.843.607.603,- dengan realisasi Rp. 5.626.367.708,- atau 96,28%.

Tabel 3.3

Capaian Konsistensi Perencanaan Pelaksanaan

Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Capaian (%)	Ket.
			Renja	RKPD		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	
2.	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemberdayaan,sumber daya manusia serta Desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100%	
3.	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik /Penghuni Rumah Susun	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	100%	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	umlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	umlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100%	
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang	Jumlah Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang	100%	
5.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK miskin yang dibantu	Jumlah KK miskin yang dibantu	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganeka ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100%	
6.	SEKRETARIAT DAERAH	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah masyarakat yang diberi bantuan social; Jumlah Masjid, Mushalla, Lembaga Keagamaan yang diberi hibah; Jumlah UKS se Kota Padang Panjang yang dibina	Jumlah masyarakat yang diberi bantuan social; Jumlah Masjid, Mushalla, Lembaga Keagamaan yang diberi hibah; Jumlah UKS se Kota Padang Panjang yang dibina	100%	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Pemberian Bantuan Badan /Lembaga)	Garin Masjid/ Petugas kebersihan yang difasilitasi honor Jumlah Guru TPQ/TPSQ yang di beri honor Jumlah Imam masjid yang difasilitasi honor Jumlah jemaah haji yang difasilitasi keberangkatan dan penjemputannya Jumlah lembaga pendidikan yang diberi hibah Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Jumlah TPQ/TPSQ Yang Mengikuti Khatam Bersama khatib cadangan yang difasilitasi honor Persentase guru TPQ/TPSQ yang bersertifikasi umlah Lembaga Didikan Shubuh Yang Dinilai	Garin Masjid/ Petugas kebersihan yang difasilitasi honor Jumlah Guru TPQ/TPSQ yang di beri honor Jumlah Imam masjid yang difasilitasi honor Jumlah jemaah haji yang difasilitasi keberangkatan dan penjemputannya Jumlah lembaga pendidikan yang diberi hibah Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Jumlah TPQ/TPSQ Yang Mengikuti Khatam Bersama khatib cadangan yang difasilitasi honor Persentase guru TPQ/TPSQ yang bersertifikasi umlah Lembaga Didikan Shubuh Yang Dinilai	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Kelayan yang Dirujuk	Jumlah Kelayan yang Dirujuk	100%	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang difasilitasi	Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang difasilitasi	100%	
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Healing yang Terfasilitasi; Jumlah rumah singgah yang difasilitasi	Jumlah Rumah Healing yang Terfasilitasi; Jumlah rumah singgah yang difasilitasi	100%	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100%	
9.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100%	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100%	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100%	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100%	

Sumber Data : BAPPEDA, Data Olahan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat untuk sasaran Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan indikator kinerja Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Perangkat daerah yang terkait program penanggulangan kemiskinan berdasarkan dokumen Renja-OPD sampai dokumen RKPD dengan Target 96,37% dan realisasi 100,00% dengan capaian (103,77%).

Untuk sasaran "Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan" di dukung oleh satu program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, satu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan satu Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Pagu anggaran pada sub kegiatan ini senilai Rp. 34.798.500,- dengan realisasi Rp. 29.701.250,- atau 85,35%.

Tabel 3.4
Capaian Konsistensi Perencanaan Pelaksanaan
Program Penurunan Stunting Tahun 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Capaian (%)	Ket.
			Renja	RKPD		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Jumlah pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil, Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan ibu hamil, Jumlah Puskesmas yang melaksanakan layanan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Jumlah pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil, Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan ibu hamil, Jumlah Puskesmas yang melaksanakan layanan ibu hamil	100%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Jumlah pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Jumlah peserta kegiatan penguiatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Jumlah pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Jumlah peserta kegiatan penguiatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Jumlah pemantauan dan pendampingan teknis pelaksnaan pelayanan kesehatan balita, Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan balita, Terlaksananya Bimtek dan Monitoring evaluasi di 4 Puskesmas, Terlaksananya kegiatan orientasi program kesehatan balita bagi nakes pada 4 Puskesmas	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Jumlah pemantauan dan pendampingan teknis pelaksnaan pelayanan kesehatan balita, Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan balita, Terlaksananya Bimtek dan Monitoring evaluasi di 4 Puskesmas, Terlaksananya kegiatan orientasi program kesehatan balita bagi nakes pada 4 Puskesmas	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan koordinasi kesehatan seproduksi tablet fe bagi remaja putri dan wanita usia subur	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan koordinasi kesehatan seproduksi tablet fe bagi remaja putri dan wanita usia subur	100%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita dan bumil kurang Gizi yang diberikan PMT, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Jumlah kader pendamping balita/ bumil kurang gizi yang diberikan PMT, Jumlah pelaksanaan kegiatan surveilans	Jumlah balita dan bumil kurang Gizi yang diberikan PMT, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Jumlah kader pendamping balita/ bumil kurang gizi yang diberikan PMT, Jumlah pelaksanaan kegiatan surveilans	100%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah depot yang dilakukan monev, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pangan aman, Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi STBM, Jumlah Pemberantasan sarang nyamuk, Jumlah pemilik depot yang mengikuti sosialiisasi, Jumlah Pemusnahan obat kadaluarsa, Jumlah sampah medis yang di bakar	Jumlah depot yang dilakukan monev, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pangan aman, Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi STBM, Jumlah Pemberantasan sarang nyamuk, Jumlah pemilik depot yang mengikuti sosialiisasi, Jumlah Pemusnahan obat kadaluarsa, Jumlah sampah medis yang di bakar	100%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Jumlah Pelaksanaan Posbindu PTM, Jumlah peserta sosialisasi penyakit menular, dan Penyakit tidak menular, Persentase Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular, Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Jumlah Pelaksanaan Posbindu PTM, Jumlah peserta sosialisasi penyakit menular, dan Penyakit tidak menular, Persentase Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular, Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	100%	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jumlah Masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan JKSS dan JKMPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jumlah Masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan JKSS dan JKMPP	100%	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monev dan penyampaian informasi vaksin covid 19, Jumlah pengelola dan/atau petugas fasilitasi pelayanan kefarmasian yang dberikan bimbingan tekhnisk tentang pengeloalaan fasilitas kefarmasian, Jumlah pertugas yang dilatih DFI yang tersertifikasi, Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Monev dan penyampaian informasi vaksin covid 19, Jumlah pengelola dan/atau petugas fasilitasi pelayanan kefarmasian yang dberikan bimbingan tekhnisk tentang pengeloalaan fasilitas kefarmasian, Jumlah pertugas yang dilatih DFI yang tersertifikasi, Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100%	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jumlah kelurahan yang dilakukan monev, Jumlah sekolah UKS yang ikut sosialisasi, Jumlah sekolah yang dilatih SBH	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Jumlah kelurahan yang dilakukan monev, Jumlah sekolah UKS yang ikut sosialisasi, Jumlah sekolah yang dilatih SBH	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	
2.	DINAS SOSIAL PPKBPPPA	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah PSM dan TKSK yang dibina	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah PSM dan TKSK yang dibina	100%	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Graduasi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Graduasi	100%	
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	100%	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100%	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100%	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100%	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100%	
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	100%	
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kader IMP yang mengikuti kegiatan refitalisasi Program Bangga Kencana dan pencegahan stunting, Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, Jumlah Pertemuan Kader IMP dan PLKB yang Dilaksanakan	Jumlah kader IMP yang mengikuti kegiatan refitalisasi Program Bangga Kencana dan pencegahan stunting, Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, Jumlah Pertemuan Kader IMP dan PLKB yang Dilaksanakan	100%	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB yang Dilaksanakan dalam Momen-momen Strategis, Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB yang Dilaksanakan dalam Momen-momen Strategis, Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	100%	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Finalisasi Duta Genre Tk. Kota, Jumlah Gelar Dagang yang Diikuti, Jumlah kegiatan GenRe yang difasilitasi, Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Jumlah Lomba Bangga Kencana yang Dilaksanakan	Jumlah Finalisasi Duta Genre Tk. Kota, Jumlah Gelar Dagang yang Diikuti, Jumlah kegiatan GenRe yang difasilitasi, Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), Jumlah Lomba Bangga Kencana yang Dilaksanakan	100%	
3.	DINAS PANGAN PERTANIAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Keikutsertaan HPS TK. Nasional, Jumlah Keikutsertaan HPS TK. Provinsi, Jumlah Pelatihan yang Dilakukan, Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Jumlah Petugas Pengelola Toga	Jumlah Keikutsertaan HPS TK. Nasional, Jumlah Keikutsertaan HPS TK. Provinsi, Jumlah Pelatihan yang Dilakukan, Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Jumlah Petugas Pengelola Toga	100%	
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko, Jumlah Data Profile Perikanan Kota Padang Panjang, Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko, Jumlah Data Profile Perikanan Kota Padang Panjang, Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	100%	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Field Day Kelembagaan Tani, Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Jumlah PENAS Tani Tingkat Nasional, Jumlah Penilaian Kelompok Tani Berprestasi, Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Tani, Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Penyuluh Pertanian)	Jumlah Field Day Kelembagaan Tani, Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya, Jumlah PENAS Tani Tingkat Nasional, Jumlah Penilaian Kelompok Tani Berprestasi, Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Tani, Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Penyuluh Pertanian)	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang, Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang, Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	100%	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik, Jumlah Septitank/MCK yang diadakan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik, Jumlah Septitank/MCK yang diadakan	100%	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan	100%	
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD, Jumlah Pendidik di Satuan PAUD yang diberi insentif	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD, Jumlah Pendidik di Satuan PAUD yang diberi insentif	100%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi, Jumlah Lembaga PTK PAUD yang dilatih	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi, Jumlah Lembaga PTK PAUD yang dilatih	100%	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen, jumlah PAUD yang dibina akreditasinya, Jumlah Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Ormit) yang dibina	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen, jumlah PAUD yang dibina akreditasinya, Jumlah Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Ormit) yang dibina	100%	
6.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Jumlah konten videotron, Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik, Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Jumlah konten videotron, Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik, Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial, Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah, Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif, Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif melalui media televisi, Jumlah penerbitan majalah Serambi Mekah, Jumlah pertemuan jumpa pers	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial, Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah, Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif, Jumlah penyelenggaraan dialog interaktif melalui media televisi, Jumlah penerbitan majalah Serambi Mekah, Jumlah pertemuan jumpa pers	100%	
		Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah, Jumlah Layanan Hubungan Media, Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah, Jumlah pertemuan jumpa pers	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah, Jumlah Layanan Hubungan Media, Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah, Jumlah pertemuan jumpa pers	100%	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan, Jumlah KIM yang aktif, Jumlah konten positif, Jumlah media tradisional yang dibina, Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan, Jumlah KIM yang aktif, Jumlah konten positif, Jumlah media tradisional yang dibina, Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	100%	
7.	DINAS PERDA-GANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100%	
8.	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun, Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi/diharmonisasi, Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi dan diharmonisasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun, Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi/diharmonisasi, Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang difasilitasi dan diharmonisasi	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	100%	
10.	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) yang dilaksanakan, jumlah lembaga LPM yang diberdayakan, Jumlah lembaga posyantek yang diberdayakan, jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi, jumlah pemenang monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan, Jumlah perserta yang dilatih, Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) yang dilaksanakan, jumlah lembaga LPM yang diberdayakan, Jumlah lembaga posyantek yang diberdayakan, jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi, jumlah pemenang monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan, Jumlah perserta yang dilatih, Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	
11.	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	'Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri, Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi, Jumlah Lokasi Kegiatan Pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan, Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Jumlah lembaga posyantek yang difasilitasi, Jumlah monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan, jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi, Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	'Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri, Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi, Jumlah Lokasi Kegiatan Pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan, Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Jumlah lembaga posyantek yang difasilitasi, Jumlah monitoring evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan, jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi, Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun, Jumlah Pertemuan FKUB	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun, Jumlah Pertemuan FKUB	100%	

Sumber Data : BAPPEDA, Data Olahan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat untuk sasaran Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting dengan indikator kinerja Persentase kinerja Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting. Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting pada Perangkat Daerah terkait berdasarkan dokumen Renja-OPD sampai dokumen RKPD dengan Target 100% dan realisasi 100%.

Untuk sasaran “Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting” di dukung oleh satu program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, satu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan satu Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Pagu anggaran pada sub kegiatan ini senilai Rp. 16.824.500,- dengan realisasi Rp. 13.815.300,- atau 82,11%.

Selanjutnya untuk melihat rata-rata ketercapaian sasaran daerah; konistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini, dimana realisasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak mencapai target dimana hal tersebut merupakan dampak dari pademi covid-19. Pada Perubahan Renstra BAPPEDA Kota Padang Panjang, dilakukan revisi yakni perubahan target untuk 2 (dua) tahun kedepan dan penambahan sasaran OPD menjadi 3 (tiga) sasaran OPD.

Tabel 3.5
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang
Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=4/3)*	*(6)*	*(7)*	*(8=7/6)*	*(9)*	*(10)*	*(11=10/9)*	*(12)*	*(13)*	*(14=13/12)*
1	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	**74**	**57,50**	**77,70%**	**71%**	**51,51%**	**72,55**	**72%**	**69,71%**	**95,49**	**73%**	**68,75%**	**94,18%**
2	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	*Merupakan Sasaran baru setelah Perubahan Renstra 2018-2023 (Tahun Pelaksanaan 2022 dan 2023)*						**95%**	**96,37%**	**101,44%**	**96,37%**	**100,00%**	**103,77%**
3	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	*Merupakan Sasaran baru setelah Perubahan Renstra 2018-2023 (Tahun Pelaksanaan 2022 dan 2023)*						**91,7%**	**100%**	**109,05%**	**100%**	**100,00%**	**100%**

Sumber Data : Data Olahan BAPPEDA, Sebagian data terbaru belum rilis

3.1.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dapat dilihat berdasarkan sasaran dan masing-masing indikatornya. Sasaran pertama *"Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah"* dengan indikator kinerja *"Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah".* Sasaran daerah yang dimaksud berjumlah 13 (tiga belas) dengan 24 (dua puluh empat) indikator, dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan

Menggeliatnya perekonomian Kota Padang Panjang tentu tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan daya saing ekonomi unggulan daerah yang berbasis kerakyatan. Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan anggaran agar Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata bisa menyelenggarakan 22 program yang mendukung pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

a. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini dapat tumbuh positif karena sektor tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga produksi dan konsumsi produk hasil sektor tersebut masih tetap terjaga di masa pandemi. Persentase pertumbuhannya bahkan jauh meningkat bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021. Meningkatnya realisasi disebabkan karena pada tahun 2022 dicanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang Panjang menjadi bagian dari tersebut dan mencanangkan sejumlah kegiatan pendukung, di antaranya Gerakan Tanam Cabai, pemberian bantuan bibit, sarana dan prasarana pertanian, dan lain-lain. Di bidang pengembangan sapi perah juga terjadi perkembangan yang menggembirakan. Setelah melalui pembinaan dan pendampingan yang cukup panjang dari Pemerintah Kota, produk susu yang dihasilkan oleh Unit Pengolah Susu yang ada di Kota Padang

Panjang berhasil memperoleh Sertifikat Halal dan Izin Edar dari BPOM RI. Dengan terbitnya izin edar ini maka susu segar yang diproduksi di Kota Padang Panjang dapat dipasarkan secara lebih luas. Laju pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sudah jauh melampaui target tahun ke-4 RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan penilaian kriteria realisasi kinerja dengan kategori sangat tinggi dan pencapaian kinerja yang sangat baik.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Capaian ini meningkat sangat tajam dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021. Faktor utama yang menyebabkan meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran ini adalah pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sepanjang tahun 2022. Presiden Joko Widodo bahkan kemudian mengumumkan kebijakan pencabutan PPKM pada tanggal 30 Desember 2022. Semua perkembangan tersebut membuat berbagai acara keramaian yang selama ini tertunda banyak diagendakan; mobilitas orang mengalami ledakan, baik untuk tujuan tugas, urusan keluarga, wisata, keagamaan, dan lain-lain. Tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Sektor perdagangan pun tumbuh dengan pesat.

Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran ini, Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan peningkatan fasilitas dan layanan sarana dan prasarana pasar. Di samping itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Padang Panjang yang dipimpin langsung oleh Walikota Padang Panjang juga senantiasa aktif melakukan pemantauan perkembangan pasar setiap harinya dengan melibatkan OPD dan stakeholder terkait lainnya. Capaian kinerja indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran semakin meningkat dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik. Jika dibandingkan dengan target tahun ke-4 RPJMD, maka capaian ini sudah jauh melebihi target.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri

Berdasarkan pencapaian PDRB untuk lapangan usaha industri pengolahan/manufacturing, terjadi peningkatan peran sektor ini terhadap perolehan PDRB Kota Padang Panjang walaupun kontribusi terhadap total PDRB turun tipis. Upaya pendukung yang dilakukan Pemerintah di sektor industri ini

adalah dengan melakukan pembinaan pada para pelaku industri melalui program Rumah Wira Usaha. Di samping itu Pemerintah Kota Padang Panjang juga senantiasa melakukan pembinaan berupa peningkatan kapasitas pada pelaku industri Kota Padang Panjang baik dari sisi keterampilan produksi, modal maupun pemasaran (desain merk, promosi, dll) serta lebih mengoptimalkan industri yang berbasis e-commerce.

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Laju pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang positif didorong oleh kondisi pelonggaran kegiatan masyarakat dengan pelonggaran PPKM di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Padang Panjang. Pelonggaran ini memberi kesempatan untuk dibuka kembali destinasi-destinasi wisata, termasuk di Kota Padang Panjang, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Peningkatan kunjungan wisatawan ini meningkatkan tingkat keterisian hotel dan penginapan Padang Panjang selain itu, dengan adanya berbagai kegiatan tingkat kota, provinsi, nasional dan internasional pada tahun 2022 yang diselenggarakan di Kota Padang Panjang, di antaranya MTQ Nasional Tingkat Kota Padang Panjang, Dakwah Wisata BKMT se-Sumatera, Launching 50 Wisata Agro Sumbar di Desa Wisata Kubu Gadang, Temu Penyair Asia Tenggara, Padang Panjang Art Fest, Tambo Art, Edu Fair, Cultural Exchange, International Minangkabau Literacy Festival, dan lain-lain. Berbagai Rapat koordinasi se-Sumatera Barat dan kegiatan lain yang diselenggarakan lembaga maupun organisasi di Padang Panjang menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya tingkat hunian hotel dan penginapan di Padang Panjang. Di sisi lain, pengusaha hotel dan penginapan juga terus didorong untuk melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta layanan kepada pengunjung sehingga menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk menginap di hotel dan penginapan di Padang Panjang.

Peningkatan pada tingkat hunian hotel dan penginapan tersebut juga meningkatkan transaksi pada sektor makan minum. Peningkatan transaksi tersebut semakin didukung dengan dilakukannya beautifikasi Pasar Kuliner Padang Panjang dengan menggunakan Dana Insentif Daerah (DID). Dengan

adanya peningkatan fasilitas ini semakin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor penyediaan makanan dan minuman dengan meningkatnya jumlah wisatawan untuk berkuliner di Padang Panjang. Pemerintah Kota Padang Panjang juga senantiasa mendorong rumah makan dan restoran di Padang Panjang menyusun strategi peningkatan kunjungan konsumen, baik dari sisi harga, pelayanan, rasa maupun promosi baik secara konvensional maupun melalui media elektronik.

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

Kualitas infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi sangat menentukan gerak dan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan. Capaian kualitas infrastruktur berkelanjutan diukur melalui 2 indikator, yaitu persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target kedua indikator bisa terpenuhi, bahkan salah satu indikator yaitu Persentase Kenaikan IKLI melebihi target yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan dana untuk Dinas Kimunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 24 program, yaitu : Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Penataan Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Penyelenggaraan Jalan; Penyelenggaraan Penataan Ruang; Pengembangan Jasa Konstruksi Kawasan Permukiman; Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Penanggulangan Bencana; Pengelolaan Persampahan; Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Penatagunaan Tanah; Pengembangan Perumahan; Perencanaan

Lingkungan Hidup; Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Berbahaya dan Beracun; Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat telah membuahkan hasil dengan sangat baik.

a. Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Secara rata-rata tidak terjadi peningkatan kualitas layanan infrastruktur, malah terlihat tren penurunan kualitas pada 4 dari 5 OPD pengelola layanan infrastruktur, dan hanya Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagai pengelola pasar pusat Padang Panjang mendapat penilaian mengalami peningkatan kualitas infrastrukturnya, dan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi OPD yang menjadi penyumbang tertinggi atas penurunan nilai IKLI.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola layanan website dan layanan wifi dinilai perlu melakukan perbaikan untuk 3 hal berikut : (1) Kualitas laman website, pada saat masyarakat membutuhkan informasi di laman website Padang Panjang, ternyata ditemui beberapa kali website down, page error bahkan masih terdapat beberapa laman yang tidak bisa diakses informasinya. Sehingga website Pemerintah Kota Padang Panjang mendapat penilaian agak kurang kualitasnya. (2) Kualitas wifi, layanan wifi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang masih dinilai kurang bermanfaat oleh masyarakat, sehingga masyarakat memilih untuk tidak memanfaatkan lagi layanan wifi yang disediakan dan memilih menggunakan paket data pribadi. (3) Literasi pemanfaatan aplikasi, aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal ini aplikasi untuk pelayanan masyarakat UDAJANG dan Aplikasi 112 masih perlu diliterasikan kegunaannya karena dari 100 responden yang diambil sebagai sampel 77% diantaranya belum pernah memanfaatkan aplikasi UDAJANG, bahkan untuk layanan aplikasi 112, 92% responden menyatakan belum pernah memanfaatkan layanan aplikasi 112 ini. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang berbiaya tinggi seharusnya

diiringi dengan pengelolaan yang paripurna agar sarana prasarana ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dinas Perhubungan sebagai pengelola prasarana/ lahan parkir perlu untuk mengupayakan penambahan lahan parkir karena lahan parkir yang ada belum mencukupi untuk masyarakat, terutama di pasar dan daerah pasar kuliner sehingga bahu jalan banyak yang digunakan sebagai lahan parkir.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengelola infrastruktur Islamic Center, perlu melakukan perbaikan : (1) Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, Sarana yang tersedia hanya akses masuk ke masjid saja, sedangkan fasilitas lainnya belum tersedia. (2) Perawatan fasilitas, Perlu segera dilakukan perbaikan fasilitas seperti lantai keramik yang pecah, saluran pembuangan tempat berwudhuk laki-laki, dan membersihkan kotoran kelelawar di sekitar tower masjid.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup perlu memberikan perhatian untuk melengkapi ruangan terbuka hijau dengan fasilitas khusus untuk disabilitas, dan meningkatkan perawatan terhadap sarana yang ada pada ruang terbuka hijau.

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagai pengelola pasar pusat Padang Panjang perlu melakukan peningkatan kualitas untuk (1) Kondisi sarana dan prasarana di blok A/B/C : a. toilet yang tersedia kadang-kadang mengalami kerusakan seperti WC tersumbat dan air tidak hidup. b. Selokan yang tersumbat di lokasi pedagang ikan menyebabkan lantai licin karena selalu basah, kotor dan becek dan menimbulkan bau yang kurang sedap. (2) Pengaturan terhadap pasar tumpah di luar bangunan pasar dan adanya pasar kuliner, karena berdampak kepada transaksi jual beli di dalam gedung.

b. IKLH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH diperoleh dari penjumlahan ketiga komponen indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang antara lain adalah: Kegiatan kolaboratif penanganan

sanitasi Kota Panjangtahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Sanitasi Kota Padang Panjang (SSK) berupa: (1) Pemicuan sanitasi terhadap masyarakat dan siswa dan oleh kader-kader Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang (2) Sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan oleh Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang (3) Pembangunan IPAL Komunal di 6 Kelurahan (Balai-Balai, Ganting, Guguk Malintang, Koto Panjang, Tanah Hitam, Sigando) yang bisa menampung limbah dari 300 rumah dan penambahan sambungan rumah dari 2 unit IPAL Komunal eksisting untuk lebih kurang 60 rumah. Disamping itu, kondisi curah hujan dan jumlah hari hujan Kota Padang Panjang yang lebih tinggi juga merupakan faktor pendukung membaiknya kualitas air dan udara di Kota Padang Panjang.

Sementara untuk nilai IKA dan IKU masih tergolong rendah nilai dimana hal ini berasal dari sampel air dari 7 sungai di Kota Padang Panjang. Diperoleh hasil 5 sungai berstatus cemar ringan dan 2 berstatus cemar sedang. Pencemaran ini tidak hanya disebabkan oleh sumber pencemar dari Kota Padang Panjang sendiri, namun juga disebabkan oleh sumber pencemar yang berada diluar Kota Padang Panjang karena seluruh sungai yang ada di Kota Padang Panjang berhulu di daerah luar Kota Padang Panjang. Rendahnya kualitas air ini terdeteksi pada sungai-sungai yang melintasi kota, bahkan sejak dari bahagian hulu yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Beberapa sumber utama yang berkontribusi pada pencemaran sungai-sungai di Kota Padang Panjang antara lain sektor domestik (rumah tangga), industri, pertanian/ peternakan dan perdagangan. Pengelolaan limbah yang tidak memenuhi baku mutu dari masing-masing sektor menjadi penyebab utama pencemaran. Parameter uji yang paling tinggi tingkat cemarannya adalah E coli dengan konsentrasi mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat melebihi baku mutu. Bakteri E coli biasanya bersumber dari tinja manusia maupun kotoran ternak.Hal ini terbukti dari status cemar sedang air sudah didapatkan dari sampel air yang diambil di wilayah perbatasan, sebelum badan air masuk ke wilayah Kota Padang Panjang.

Sementara itu IKTL tidak cukup membantu untuk mendongkrak nilai IKLH, karena areal pertanian berupa sawah di Kota Padang Panjang yang sebelumnya digolongkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak dapat lagi dihitung

sebagai penyumbang luas RTH di Kota Padang Panjang, dengan adanya perubahan dalam penentuan Luas Tutupan Hutan dan Luas Tutupan Vegetasi Non Hutan. Untuk meningkatkan nilai IKTL Kota Padang Panjang perlu dilakukan peningkatan kegiatan rehabilitasi hutan dan menentukan alternatif lain dalam menambah luas RTH, diantaranya dengan mendorong penumbuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang Panjang berupa pembangunan Taman Kota maupun Hutan Kota, sehingga vegetasi berupa pohon, maupun belukar bisa ditumbuhkembangkan dalam wujud Taman Kota maupun Hutan Kota.

Langkah yang diambil Pemerintah untuk meningkatkan nilai IKLH, khususnya IKA adalah sebagai berikut : (1) Melakukan kegiatan untuk perbaikan kualitas air, terutama air permukaan seperti sungai atau badan air lainnya. (2) Melaksanakan akreditasi Labor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. (3) Menetapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. (4) Melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup. (5) Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola dampak usaha dan/atau kegiatannya. (6) Melaksanakan penetapkan kebijakan pembinaan dan penegakan hukum lingkungan terhadap ketaatan masyarakat dan pelaku usaha. (7) Menggunakan data hasil pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. (8) Menerapkan kebijakan pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) untuk mengurangi masalah persampahan. Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, pengelolaan sampah dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dapat membantu mengurangi masalah persampahan yang mempengaruhi tingkat kualitas lingkungan hidup.

3. Menurunnya Angka Kemiskinan

Capaian sasaran strategis menurunnya ketimpangan dan kemiskinan diukur menggunakan 2 indikator yaitu : Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini. Dalam upaya mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil

Menengah, Dinas Sosial PPKBP3A, Sekretariat Daerah untuk melaksanakan 5 program yang menunjang pencapaian penurunan angka kemiskinan, sebagai berikut : (1) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, (2) Pengembangan UMKM (3) Perlindungan dan Jaminan Sosial, (4) Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dan (5) Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Program Penanggulangan Kemiskinan di atas dievaluasi oleh TKPKD melalui pertemuan untuk merencanakan, mensinergikan dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, maupun oleh pihak lain seperti BAZNAS, perbankan, dunia usaha dan organisasi masyarakat lainnya.

a. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan yang diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Padang Panjang. Secara garis besar, capaian kinerja menurunkan tingkat kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Karena selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Berikut disajikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Penduduk miskin di Kota Padang Panjang.

Beberapa strategi Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan diantaranya adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Untuk upaya pencapaian target tingkat kemiskinan Pemerintah Kota Padang Panjang telah meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan penanggulangan kemiskinan serta upaya-upaya lainnya, seperti upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dalam upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Langkah-langkah yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

(1) Meningkatkan Cakupan PMKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial.

Beberapa pelayanan social yang diberikan dalam peningkatan cakupan PMKS diantaranya adalah bantuan social tunai maupun non tunai bagi fakir miskin, perlindungan khusus bagi anak-anak terlantar dan bermasalah, bantuan makanan dan perlengkapan bagi masyarakat lansia dan alat bantu bagi penyandang disabilitas serta pelayanan psikososial bagi keluarga bermasalah.

(2) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Bagi MBR

Semula Kegiatan Rumah tidak layak huni ditargetkan sebanyak 43 unit/orang, dari jumlah yang ditargetkan terealisasi sebanyak 40 unit/orang sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah 93%. Kurang maksimalnya pencapaian target disebabkan dari 43 Unit/orang yang ditargetkan,1 orang didaftar penerima bantuan meninggal dan 2 orang lainnya terkendala di persyaratan administrasi.

(3) Peningkatan pendapatan petani penerima bantuan social

Untuk mencapai target indikator kinerja peningkatan pendapatan petani penerima bansos didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut berupa sarana dan prasarana peternakan antara lain sapi potong dan konsentrat sapi potong. Adapun faktor-faktor pendorong pencapaian sasaran adalah : a) Meningkatnya nilai tambah dari ternak bantuan Bansos tersebut. b) Upaya dari Dinas Pangan dan Pertanian dalam memantau bantuan yang telah diberikan kepada petani yakni melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petani sehingga permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera ditindaklanjuti, salah satunya yaitu pengobatan terhadap ternak yang diserahkan.

(4) Penurunan Angka Kemiskinan sektor UMKM

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan masyrakat kota padang panjang khususnya bagi pelaku usaha mikro dan IKM dari keluarga Pra sejahtera adalah dengan memberikan bantuan sosial berupa mesin dan peralatan produksi, gerobak dan perbaikan warung. Diharapkan

dengan adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan produktifitas usaha yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang bergerak disektor UMK untuk setiap tahunnya.

b. Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indeks yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Secara umum angka Indeks Gini berada pada kisaran nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). GR bernilai 0 (nol) menunjukan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan GR bernilai 1 (satu) menunjukan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian GR di upayakan agar mendekati 0 (nol). Hal ini di lakukan untuk menunjukan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Jadi semakin besar nilai Gini Ratio, semakin besar ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Penurunan Indeks Gini Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan mengalami penurunan, atau dengan kata lain terjadi peningkatan pemerataan distribusi pendapatan pada masyarakat Kota Padang Panjang. Salah satu faktor pendukung keberhasilan Kota Padang Panjang dalam menurunkan indeks Gini adalah intensifnya Pemerintah Kota Padang Panjang menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya : (1) Pemberian Bantuan langsung tunai BBM yang berasal dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang Panjang. (2) Bantuan modal usaha dalam bentuk bantuan pelatan yang berasal Pemerintah Kota Padang Panjang untuk UMKM Padang Panjang. (3) Bantuan subsidi upah bagi tenaga kerja rentan.

4. Menurunnya Angka Pengangguran

Capaian tingkat pengangguran diukur menggunakan indikator Menurunnya Tingkat Pengangguran. Dalam upaya mencapai target yang ditetapkan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan 2 program yang menunjang pencapaian penurunan tingkat pengangguran, sebagai berikut : (1)

Penempatan Tenaga Kerja; (2) Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Panjang adalah :

(1) Komitmen Walikota Padang Panjang melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam hal peningkatan skill calon pencari kerja melalui pelatihan pelatihan yang berbasis kompetensi dan pelatihan lainnya baik yang sumber dananya berasal APBD Kota Padang Panjang, APBD Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan RI atau sumber dana lainnya.

(2) Pada tahun 2022 Kota Padang Panjang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi pelatihan gratis dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi, Serang, Bandung, Semarang dan Medan.

(3) Penciptaan Wira Usaha Baru, Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Tujuan dari kegiatan ini adalah penciptaan wira usaha baru melalui kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kerja

(4) Kegiatan Padat Karya, Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan paket padat karya sebanyak 1 paket di Kelurahan Ganting, dengan jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap sebanyak 40 orang.

(5) Optimalisasi Informasi Lowongan Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang untuk mengotimalkan penempatan pencari kerja juga telah melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang dan perusahaan lainnya di Sumatera Barat serta di luar provinsi Sumatera Barat melalui pemberian informasi lowongan kerja, setiap lowongan kerja yang didapatkan diteruskan kepada pencari kerja di Kota Padang Panjang.

(6) Kerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang juga mengadakan kerjasama dengan seluruh BKK yang ada di Kota Padang Panjang dalam bentuk penyampaian informasi lowongan kerja, pemberian motivasi pada BKK agar mengoptimalkan penempatan lulusan Sekolah Menengah dan kegiatan lain untuk mengurangi angka penggangguran.

5. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Capaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat diukur menggunakan indikator pengeluaran per kapita (daya beli masyarakat). Pengeluaran per kapita adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang Pemerintah mengalokasikan anggaran agar Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata bisa melaksanakan program : (1) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (2) Penyuluhan Pertanian.

6. Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan

Pendidikan adalah bagian sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Karena pendidikan merupakan sebuah proses yang sistematis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam membangun negara. Bahkan dalam pengukuran indeks pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme, pendidikan menjadi dimensi penting. Kinerja sasaran “Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan” diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu “Rata-Rata Lama Sekolah” dan “Harapan Lama Sekolah”.

Dalam upaya untuk mencapai peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasi anggaran bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk melaksanakan 2 program yang bisa mendukung capaian sasaran

meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan, yaitu : (1) Pengelolaan Pendidikan, (2) Pembinaan Perpustakaan

Faktor-faktor pendukung peningkatan capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan adalah : (1) Pelaksanaan program pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi yang bersekolah dan memiliki Kartu Keluarga Padang Panjang, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), (2) Membaiknya kualitas penyelenggaraan pendidikan.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Faktor pendukung yang mempengaruhi meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Kota Padang Panjang, sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah berikut ini : (1) Berdasarkan data BPS Kota Padang Panjang Tahun 2022 Persentase penduduk usia 7-24 tahun yang masih bersekolah adalah 78,57% dan tidak sekolah lagi adalah 20,89%. (2) Berdasarkan angka realisasi Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mengindikasi bahwa tingginya angka partisipasi penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan Kota Padang Panjang.

7. Meningkatnya Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang berkesinambungan, terpadu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan. Kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu “Angka Harapan Hidup (AHH)” dan “Prevalensi Stunting”. Cerminan derajat kesehatan suatu masyarakat diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) dan prevalensi stunting. AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang diukur melalui angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Sementara Pada Sasaran Strategis 7 yaitu Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat, AHH dijadikan sebagai Indikator Kinerja sasaran.

Dalam upaya mendukung pencapaian AHH, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PPKBP3A, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan 10 program, yaitu : (1) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, (2) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (untuk RSUD), (3) Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera; (4) Pembinaan Keluarga Berencana, (5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, (6) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, (7) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, (8) Pengelolaan dan Sistem Penyediaan Air Minum, (9) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (10) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Capaian AHH Kota Padang lebih baik jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, AHH Kota Padang Panjang masih berada pada peringkat 5 setelah Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Padang.

Faktor pendorong meningkatnya AHH Kota Padang Panjang adalah : (1) Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. (2) Menurunnya persentase balita gizi buruk (3) Menurunnya jumlah kematian ibu. (4) Menurunnya jumlah kematian bayi. 5) Pelaksanaan pembiayaan jaminan kesehatan bagi penduduk oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

Hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai strategi dan pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan urusan kesehatan di Kota Padang Panjang, yaitu :

(1) Upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) terus dilakukan. Sejalan dengan program pemerintah yang menetapkan penurunan angka kematian ibu dan bayi sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien maka telah dilakukan berbagai strategi diantaranya: (a) Meningkatkan pelayanan maternal dan neonatal di fasilitas pelayanan kesehatan publik. (b) Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap. (c) Meningkatkan pemahamanan pentingnya gizi pada ibu hamil. (d) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor. (e) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kader kesehatan dan penggerakkan posyandu.

(2) Upaya penurunan Angka Kesakitan

Untuk mengurangi angka kesakitan dilakukan upaya sebagai berikut : (a) Meningkatkan cakupan deteksi dini kasus penyakit menular dan menular dengan memanfaatkan berbagai layanan dan sarana. (b) Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pelaksanaan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, peningkatan skrining dan deteksi dini PTM di semua puskesmas, jejaring dan jaringannya. (c) Melaksanakan berbagai sistem pencatatan dan pelaporan dan sistem informasi yang dapat menjadikan informasi untuk melakukan kebijakan yang responsif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

(3) Upaya Peningkatan Status Gizi

Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Sejalan dengan program pemerintah, di Kota Padang Panjang telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah gizi.

Disamping 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yang telah dijelaskan diatas, keberhasilan pencapaian indikator sasaran AHH juga didukung dengan dilakukannya berbagai strategi dalam mendukung pencapaian tersebut, yaitu: (1) Penguatan sistem layanan kesehatan (2) Adanya program prioritas di bidang kesehatan (Jamkes Serambi (JKM-PP), KHADIM SERAMBI MEKAH (PSC 119), Dokter UMMAT). (3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu meningkatkan cakupan pemenuhan 9 (Sembilan) tenaga kesehatan strategis di Puskesmas, yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Petugas Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Tenaga Kefarmasian, Nutrisionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Kota Padang Panjang telah memenuhi target tersebut dengan cakupan 100%. SDM Kesehatan yang ada telah dapat dioptimalkan guna mendukung pencapaian berbagai program dan kegiatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan memahami pendekatan terhadap faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pencapaian 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota Padang Panjang.

b. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting diukur dari persentase jumlah anak balita sangat pendek (stunting) dibagi jumlah anak balita. Berdasarkan sumber data E-ppgbm (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) diketahui sekitar 419 balita stunting dari 3330 balita yang diukur, dari perhitungan tersebut disimpulkan bahwa prevalensi stunting pada balita adalah sebesar 14,74%, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pencapaian target prevalensi stunting telah melampau target Renstra Kota Padang Panjang tahun 2022 yaitu 15,51%.

Beberapa faktor pendukung pencapaian target adalah :

(1) Penguatan surveilans gizi dengan meningkatkan deteksi dini masalah gizi pada balita pada pemantauaun tumbuh kembang pada posyandu balita setiap bulan dengan dibuktikan peningkatan jumlah kunjugan balita ke posyandu dari tahun 2021 D/S sekitar 82,68% dan pada tahun 2022 sekitar 87.31%.

(2) Pemberian makanan tambahan pabrikan pada balita gizi kurang dan bumil KEK bertujuan menambahkan asupan gizi dalam upaya perbaikan status gizi yang didistribusikan pada saat sasaran di rujuk ke puskesmas
(3) Pembentukan Pos Gizi di beberapa kelurahan di wiayah kerja puskesmas, sebagai tempat penyelenggaraan makanan tambahahan lokal (PMT Lokal) bagi balita dan bumil dengan mengkombinasikan peningkatan pengetahuan ibu balita dan ibu hamil
(4) Penguatan perluasan sasaran edukasi gizi sejak dari hulu (calon ibu) di mulai dari peningkatan edukasi gizi pada remaja putri dan calon pengantin agar pahami pentingnya gizi seimbang sesui kebutuhan
(5) Penguatan kualitas pelayanan dan integrasi program dalan integarsi konseling dan penyuluhan gizi pada Pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di setiap kelurahan.
(6) Penguatan koordinasi lintas OPD terkait intervensi spesifik dan sensitive bagi sasaran ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita
(7) Optimalisasi kegiatan konvergensi stunting lintas OPD terkait pemetaan sasaran perwilayah

8. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak warga masyarakat antara lain rasa aman, tentram dan tertib sehingga terhindar dari perilaku tindakan tidak bertanggung jawab oleh pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan yang berdampak kepada masyarakat secara umum. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim dan kondisi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. tingkat penyelesaian pelanggaran kententraman dan ketertiban umumtelah sesuai target yang ditetapkan. Demikian juga dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi tingkat penyelesaian adalah 100%, artinya seluruh pelanggaran kententraman dan ketertiban umum dapat diselesaikan.

Selanjutnya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat yang mengarah kepada perzinaan Pasal 5 huruf a pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 6 kasus, dan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan Pasal 6A huruf A ditemukan sebanyak 1 kasus, dalam penyelesaian kasus-kasus ini pelanggar akan diberi binaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Muda dihadapan orang tuanya dan melakukan wajib lapor selama 1 minggu,dan menandatangani Surat Pernyataan, hal ini bertujuan agar adanya efek jera dan tidak mengulangi perbuatan yang merusak pada dirinya.

Keberhasilan ini tak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 5.588.477.800 bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan 4 program, yaitu : (1) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, (2) Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, (3) Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, (4) Pencegahan, Penanggulangan, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk pencapaian yang sangat tinggi tersebut, telah dianalisa Faktor-faktor pendorong terselesaikannya seluruh kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : (1) Terlaksananya operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya. (2) Terlaksananya operasi Pengamanan pemilu legislatif/ pilpres. (3) Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar. (4) Terlaksananya Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota. Meskipun pencapaian indikator sasaran telah sesuai target, tetap dilaksanakan upaya-upaya pencegahan agar angka jumlah pelanggaran bisa berkurang, antara lain melalui penyuluhan dan sosialialisasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012.

9. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pendataan dan pengelolaan data PPKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi: (1) Rehabilitasi Sosial; (2) Jaminan Sosial; (3) Pemberdayaan Sosial; (4) Perlindungan Sosial; dan (5) Penanggulangan Kemiskinan.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang melakukan pelayanan sosial terhadap PPKS diantaranya telah mendapatkan pelayanan, dengan rincian sebagi berikut : (a) Fakir miskin sejumlah 2219 yang memperoleh bantuan dari APBD maupun dari Kemensos berupa PKH, bansos tunai dan non tunai. (b) Anak terlantar sebanyak 13 orang yang diberikan perlindungan khusus melalui pelayanan LK3, P2TP2A dan Rumah Healing. (c) Anak yang berhadapan dengan socia sebanyak 1 orang yang diberikan perlindungan khusus melalui pelayanan LK3, P2TP2A dan Rumah Healing. (d) Lanjut usia terlantar sebanyak 352 orang yang memperoleh bantuan permakanan dan perlengkapan kamar lansia. (e) Penyandang disabilitas sebanyak 310 orang yang memperoleh bantuan permakanan dan alat bantu.

Dalam upaya mencapai target menurunnya masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi Dinas Sosial PPKBP3A, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan 6 program, yaitu : (1) Rehabilitasi Sosial, (2) Pemberdayaan Sosial, (3) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, (4) Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan

Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, (5) Perlindungan Perempuan, dan (6) Pengendalian Penduduk

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam usaha menurunkan jumlah PPMKS di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut : (a) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan PMKS melalui pemberian bantuan pangan non tunai baik melalui dana APBD maupun dana APBN, (b) Pengembangan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Perkotaan, (c) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan, (d) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat dan pengembangan serta peningkatan kemandirian penyandang disabilitas berat melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan organisasi PPDI. (e) Meningkatkan produktifitas lansia melalui penyediaan kebutuhan dasar dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelompok lansia di Kota Padang Panjang. (f) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana. (g) Peningkatan kualitas penanganan dan pemberdayaan penyandang penyakit sosial. (h) Peningkatan kualitas penanganan bagi anak jalanan melalui fasilitasi rumah singgah. (i) Penjaringan para pelaku usaha dalam penanggulangan kesejahteraan social. (j) Penyediaan data base kemiskinan, (k) Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pengembangan Rumah Healing.

10. Meningkatnya aktivitas keagamaan dimasyarakat

Capaian sasaran strategis meningkatnya aktivitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat diukur melalui 2 indikator yaitu persentase aktivitas keagamaan di masjid dan persentase pemajuan kebudayaan. Dalam upaya untuk mencapai target meningkatnya aktivitas keagamaan adat dan budaya di masyarakat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan 2 program, yaitu : (1) Pengembangan Kebudayaan. (2) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

a. Persentase Aktivitas Keagamaan di Mesjid

Menyandang julukan sebagai Kota Serambi Mekkah, Kota Padang Panjang tentunya akan selalu diidentikkan dengan aktivitas keagamaan yang

lebih dominan. Selain keberadaan lembaga pendidikan keislaman yang sudah sejak lama menjadi rujukan oleh berbagai pihak dalam dan luar negeri, berbagai aktivitas keagamaan juga menjadi tolok ukur citra kota. Dalam perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang dari waktu ke waktu, indikator keagamaan selalu menjadi perhatian dan tidak pernah ditinggalkan. Aktivitas keagamaan di masjid yang dijadikan komponen penilaian indikator meliputi kegiatan Majlis Taklim, Remaja Masjid, Didikan Subuh dan Subuh Mubarakah.

Tingkat keaktifan pada masing-masing komponen dipengaruhi oleh faktor dan kondisi yang berbeda. Dari 45 masjid yang ada di Kota Padang Panjang, terdapat 32 masjid yang telah memiliki kelompok Majlis Taklim. Seluruh kelompok Majlis Taklim tersebut secara rutin mengikuti pertemuan bulanan tingkat Kota Padang Panjang yang pelaksanaannya digilir dari masjid ke masjid. Selain itu, masing-masing kelompok majlis taklim juga telah memiliki jadwal dan program rutin di masjid masing-masing. Terkait dengan kegiatan Remaja Masjid, terlihat tingkat aktivitas yang lebih sedikit. Dari 45 masjid yang ada, hanya 8 masjid yang aktif melaksanakan kegiatan wirid remaja. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih rendahnya animo para remaja serta keterbatasan anggaran.

Kondisi yang berbeda terjadi pada aktivitas Didikan Subuh. Aktivitas ini rutin dilaksanakan oleh seluruh TPQ/MDA setiap minggu. Di Kota Padang Panjang terdapat 60 TPQ/MDA yang umumnya terintegrasi di masjid dan mushalla yang ada. Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya melakukan aktivitas Didikan Subuh di masjid-masjid. Aktivitas selanjutnya yang menjadi komponen penilaian indikator adalah Subuh Mubarakah. Aktivitas ini pada dasarnya adalah aktivitas yang sering dilaksanakan di masjid-masjid setiap bulan. Namun pelaksanaannya ada yang dilakukan secara sederhana dan terbatas untuk jama'ah tetap masjid dan ada juga yang diselenggarakan secara resmi serta dipublikasikan secara luas.

Meskipun dilaksanakan secara terbatas, Pemerintah Kota Padang Panjang tetap memberikan dukungan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan, baik yang dilaksanakan dilingkungan masjid maupun di tempat-tempat lainnya. Dukungan fasilitasi tersebut antara lain: (1) Pembinaan Remaja Masjid tingkat Kota Padang Panjang sebanyak 12 kali. (2) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

2 kali. (3) Penyediaan Fasilitas Program Smart Surau pada 4 masjid. (4) Fasilitasi jaringan internet pada 45 masjid. (5) Dukungan operasional pengelolaan Masjid Islamic Centre. (6) Pelaksanaan Wirid Korpri pada minggu I dan III setiap bulannya baik secara virtual maupun dilaksanakan secara tatap muka di Masjid Islamic Centre. (7) Pelatihan bagi Imam Masjid se Kota Padang Panjang.

Dukungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengairahkan kehidupan keagamaan juga ditunjukkan dalam bentuk pemberian insentif terhadap imam masjid, garin masjid dan mushalla serta guru TPQ/MDA serta bantuan hibah untuk masjid dan mushalla.

b. Persentase Pemajuan Kebudayaan

Persentase pemajuan kebudayaan merupakan indikator yang baru. Persentase pemajuan kebudayaan diukur dari rata-rata nilai pemajuan kebudayaan dari 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, yaitu (1) Manuskrip, (2) Tradisi Lisan, (3) Adat Istiadat, (4) Ritus (cagar budaya yang sifatnya kepercayaan), (5) Pengetahuan Tradisional (pasambahan), (6) Teknologi Tradisional, (7) Seni, (8) Bahasa, (9) Permainan Rakyat, (10) Olahraga Tradisional.

Masing-masing objek dinilai berdasarkan 6 langkah pengelolaan, yaitu : (1) 30% identifikasi, (2) 10% observasi, (3) 5% sosialisasi, (4) 10% internalisasi, (5) 15% dokumentasi, (6) 30% literasi. Saat ini terlihat bahwa baru 2 objek pemajuan kebudayaan yang telah dikelola secara penuh yaitu Pengetahuan Tradisional dan Seni, sementara manuskrip pengelolaannya baru sebatas identifikasi saja.

11. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu : Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Opini BPK Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengalokasikan anggaran di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyelenggarakan 23 program kegiatan berikut : (1) Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Penyelenggaraan pengawasan. (4) Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi. (5) Pengelolaan Keuangan Daerah. (6) Pengelolaan Barang Milik Daerah. (7) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. (8) Pengembangan Sumber Daya Manusia. (9) Penelitian dan Pengembangan Daerah. (10) Pengelolaan Pendapatan Daerah. (11) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. (12) Penyelenggaraan Statistik Sektoral. (13) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (14) Pengelolaan Arsip. (15) Informasi dan Komunikasi Publik. (16) Kepegawaian Daerah. (17) Pendaftaran Penduduk. (18) Pencatatan Sipil (19) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (20) Pengelolaan Profil Kependudukan (21) Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik (22) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (23) Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

a. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Pemerintah Daerah dilihat dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Diharapkan nilai Evaluasi SAKIP meningkat setiap tahunnya. Hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran daerah secara efektif dan efisien. Nilai SAKIP terus mengalami peningkatan meskipun belum sesuai target. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Faktor penghambat yang menyebabkan lambatnya kenaikanan nilai SAKIP berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB dalam implementasi nilai SAKIP antara lain : (1) Belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja, (2) Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup, (3) Terdapat ketidakselarasan antara perjanjian kinerja dan rencana strategis pada

sebagian perangkat daerah terkait sasaran strategis dan indikator kinerja. (4) Dokumen penjenjangan kinerja belum memiliki kualitas yang cukup baik karena masih cenderung berdasarkan hirarki organisasi, belum berdasarkan logical framework. (5) Belum memiliki pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja, yang digunakan di level pemda maupun unit kerja. (6) Pelaksanaan pengukuran kinerja secara belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi untuk mempermudah pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemda maupun perangkat daerah. (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada sebagian perangkat daerah masih berorientasi pada penyerapan anggaran, sedangkan kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya secara berkala. (8) Laporan kinerja belum dipublikasikan secara umum melalui website resmi Pemerintah Kota Padang Panjang. (9) Sebagian besar laporan kinerja pada level perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai. (10) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. (11) Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. (12) Sebagian besar perangkat daerah belum menindaklanjuti hasil evaluasinya. (13) Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap perangkat daerah.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan implementasi SAKIP adalah : (a) Menyusun rencana tindaklanjut dari semua rekomnedasi yang diberikan oelh Kementerian PANRB pada LHE tahun sebelumnya. (b) Melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat. Hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RPJMD Kota Panjang periode 2018-2023. (c) Melakukan reviu atas keselarasan antar kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan. (d) Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, keuangan

dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh. Hal ini dilakukan melalui aplikasi *serambiplan* dalam hal perencanaan di Bappeda dan penggunaan SIPD dalam hal penganggaran dan keuangan. Pada tahun 2023 juga sudah dibangun aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja di Bappeda. (e) Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi. Hal ini didorong dengan surat dari BKPSDM ke seluruh OPD untuk meningkatkan dialog kinerja. (f)Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memberikan bimbingan penulisan laporan kinerja bagi perangkat daerah.

b. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian system pemerintahan. Terdapat empat jenis opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat. Capaian untuk indikator Opini BPK Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 sesuai target tetap bertahan dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Dimana opini ini merupakan opini tertinggi yang di berikan BPK kepada instansi pemerintah.

Faktor - faktor pendukung atau Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan Opini BPK tersebut adalah : (1) Rekonsiliasi data dengan OPD secara periodik. (2) Melakukan sosialisasi mengenai kiat-kiat penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh PPK OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. (3) Melakukan pendampingan secara khusus kepada masing-masing OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Padang Panjang . (4) Melakukan koordinasi dengan BPK dalam penyusunan laporan keuangan.

c. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan

urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, dan dijadikan acuan dasar dalam pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa kendala yang diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian indeks inovasi tahun 2022 diantaranya adalah :

(1) Adanya perubahan penghitungan nilai indeks inovasi daerah tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 selain kualitas inovasi, kuantitas inovasi daerah turut serta menjadi faktor penentu dalam pengukuran nilai indeks. Tahun 2021 nilai indeks mutlak ditentukan dari kualitas inovasi daerah semata, sedangkan kuantitas inovasi daerah masuk ke dalam penghitungan satuan pemerintah daerah. Perubahan komposisi penghitungan nilai indeks itu juga disederhanakan dengan nilai satuan inovasi daerah dari 150 menjadi 111. Perubahan itu sedikit banyak merubah bobot pada masing-masing indikator inovasi. Perubahan terhadap indikator itu lebih detail pada poin berikutnya diuraikan.

(2) Adanya perubahan bobot pada masing-masing indikator inovasi yang diusulkan. Indikator yang signifikan perubahannya adalah replikasi inovasi daerah. Tiap satu kali replikasi oleh daerah lain maka akan memperoleh nilai kelipatan tiga. Berbeda dari penilaian inovasi tahun 2021 yang hanya kelipatan satu. Replikasi ini secara sangat berarti merefleksikan inovasi daerah Kota Padang Panjang yang pada pelaporan tahun 2022 sebagian besar masih baru dirintis pada tahun 2021 sehingga potensi replikasinya masih sangat rendah.

(3) Inovasi yang diusulkan, lebih kurang 42 persennya adalah inovasi baru atau pengembangan inovasi sebelumnya. Poin ini berkaitan juga dengan poin nomor 2 sebelumnya. Kota Padang Panjang menginisiasi inovasi daerah melalui laboratorium inovasi pada tahun 2020 dengan melibatkan peran serta Lembaga Administrasi Negara. Pada awalnya

ada lebih kurang 150 inovasi yang berhasil diinisiasi. Namun seiring waktu, inovasi tersebut sebagian besar terpaksa tertunda dan berhenti karena penanganan wabah covid-19. Dari 150 inovasi itu, hanya 89 inovasi yang dianggap layak untuk dinilai pada IGA 2021. Jumlah itu berkurang lagi menjadi hanya 68 inovasi pada pelaporan tahun 2022. Dari 117 inovasi yang diajukan pada IGA 2022, sekitar 49 inovasi lagi adalah inovasi baru diluar proses inisiasi laboratorium inovasi. Inovasi baru tersebut sebagian besar tingkat kematangannya belum optimal pada tahun pertama inisiasi.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan Indeks Inovasi daerah, antara lain : (1) Memberikan dorongan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan jumlah dan kualitas Inovasi baru. (2) Melakukan pembinaan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan dan mengembangkan inovasi yang sudah ada. (3) Memberikan penghargaan kepada OPD yang memiliki inovasi terbaik

d. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan masyarakat merupakan ukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang mereka terima. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kota Padang Panjang selalu melakukan survei kepuasan masyarakat setiap tahunnya. Agar hasil survei lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka survei kepuasan masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu LPPM (Lembaga penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas andalas.

Dari 28 (dua puluh delapan) unit pelayanan yang disurvei, Seluruhnya memiliki kinerja layanan dengan mutu A pada kategori sangat baik. Hal ini seiring dengan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dimana Kota Padang Panjang mendapatkan penghargaan atas pencapaiannya dengan kategori A dan Opini Kualitas Tertinggi dengan nilai 89,26. Demikian juga dengan hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

(PEKPPP) oleh KementerianPANRB, yang tercermin dari Indeks Pelayanan Publik Kota Padang Panjang sebesar 4,35 pada kategori A-.

Pemerintah Kota Padang Panjang telah dan terus berupaya untuk membenahi pelayanan publik melalui : (1) Komitmen pimpinan terhadap peningkatan pelayanan publik. (2) Implementasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pada setiap OPD dan unit pelayanan publik. (3) Meningkatkan kompetensi petugas pengaduan dan meningkatkan kinerja pengelolaan pengaduan pada setiap OPD dan unit pelayanan publik. (4) Meningkatkan fasilitas yang menunjang pelayanan publik, termasuk bagi masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas). (5) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik pada setiap OPD dan unit pelayanan publik.

Faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian Indek Kualitas Masyarakat sedikit dibawah target antara lain :

(1) Kurangnya sosialisasi sarana pengaduan secara offline maupun online pada beberapa kelurahan, sehingga hanya sedikit masyarakat yang menggunakan sarana unit pengaduan yang tersedia .
(2) Masih terdapat unit layanan (kelurahan) yang belum menyediakan informasi alur dan mekanisme pengaduan.
(3) Masih kurangnya ketersediaan prasarana penunjang (misal: ruang tunggu, mushala, toilet, kantin, dll) di puskesmas

12. Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif. Lembaga kemasyarakatan yang aktif ditandai oleh kriteria berikut : (a) Melakukan pertemuan rutin setiap bulan. (b) Memiliki kegiatan rutin sekurang-kurangnya 1 kegiatan setiap bulan. (c) Aktif mengikuti kegiatan yang diaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. (d) Menyampaikan pelaporan organisasi kepada Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang setiap tahun.

Dalam upaya meningkatkan peran serta kelompok/ Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan, pemerintah mengalokasikan dana anggaran bagi Kecamatan, Dinas Sosial PPKBP3A, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan 6 program berikut : (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. (2) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. (3) Pemenuhan Hak-Hak Anak. (4) Perlindungan Khusus Anak. (5) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. (6) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. (7) Penanganan Bencana. (8) Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. (9) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Faktor pendukung yang menyebabkan tingginya capaain kinerja pada sasaran ini antara lain :

(1) Pembinaan yang dilakukan setiap tahun sebanyak 4 kali oleh tim kota yang terdiri dari PKK Kota, Karang Taruna Kota dan DPD LPM Kota.
(2) Tingginya Komitmen pimpinan beserta Camat dan Lurah untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Kecaatan/Kelurahan.
(3) Dukungan anggaran serta tingginya motivasi berbagai lembaga dengan adanya berbagai kegiatan pemberdayaann masyarakat.
(4) Tingkat partisipasi LPM yang cukup tinggi untuk melakukan kegiatan di bidang pembangunan walaupun tidak didukung oleh anggaran.

13. Meningkatnya Pemberdayaan Gender

Untuk menilai sejauh mana pemberdayan Perempuan di Kota Padang Panjang, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu indeks pemberdayaan gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gendDalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan, pemerintah mengalokasikan anggaran bagi Dinas Sosial PPKBP3A untuk melaksanakan 6 program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan gender.er dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Secara umum hal-hal yang menyebabkan adanya faktor penghambat dalam pencapaian indikator sasaran daerah, yakni (1) Adanya kebijakan-kebijakan pusat yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah. (2) Kondisi perekonomian masyarakat yang masih terdampak pasca Covid 19. (3) Adanya beberapa indikator yang masih sulit dicapai oleh perangkat daerah.

Sasaran kedua ”Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan” dengan indikator kinerja ”Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan”. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini yakni semakin tingginya tingkat kepedulian seluruh pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang, hal ini berimbas kepada semakin maksimalnya tingkat capaian program penanggulangan kemiskinan dengan capaian rata-rata 100%.

Selain dari faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di atas, kendati capaian sudah sampai pada taraf maksimum, akatetapi masih ada hal-hal yang menjadi factor penghambat dalam pelaksanaan penaganan kemiskinan, diataranya :

1. Kemiskinan Multidimensi

Penyebab kemiskinan tidak hanya faktor ekonomi tapi disebabkan oleh banyak faktor lainnya. Dan tidak jarang rendahnya ekonomi masyarakat disebabkan faktor-faktor lain sebagai penyebab. Hal ini menjadi sebuah hambatan dan tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Penanganan penyebab terciptanya kemiskinan dan kantong-kantong kemiskinan menyebabkan banyak hal yang harus ditangani seperti pembenahan sektor pendidikan yang menyebabkan tidak cukupnya kompetensi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sektor kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan rendahnya peluang untuk bekerja dengan baik sehingga menurunnya pendapatan masyarakat, sektor minimnya lapangan usaha yang menyebabkan sedikitnya pilihan peluang untuk bekerja.

Padang Panjang sebagai salah satu Kota Kecil di Sumatera Barat dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Tahun 2022 dlam dokumen Padang Panjang dalam angka adalah sebanyak 57.850 jiwa dengan jenis pekerjaan terbanyak adalah petan pekerja lepas sebanyak 2.244 orang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh stakehodel terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Disamping itu permasalahan budaya dan kultur masyarakat juga merupakan permasalahan tersendiri, meskipun belum dikaji secara detil, akan tetapi data menunjukkan bahwa ada hal yang harus dibenahi terhadap budaya dan kultur untuk bangkit dari zona kemiskinan. Analiss data yang bersumber dari data P3KE Kondisi September 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang didominasi oleh masyarakat usia produktif yang tidak bekerja cukup tinggi sebanyak 4.035 orang atau 46,56 pesen dari total masyarakat miskin yang tidak bekerja.

Begitu juga jika kita lihat dari tingkat pendidikan, Tingkat pendidikan SMA dan Tamatan Sarjana memberikan warna yang cukup dominan pada penduduk miskin Kota Padang Panjang, secara hubungan sebab akibat sederhana seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi peluang dalam bekerja. Logika tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang ada dilapangan, 25,31 persen dari jumlah penduduk miskin adalah tamatan SMA sederajat dan 2,3 pesen adalah tamatan Sarjana. Hal ini mengindikasikan bahwa

ada hal secara budaya dan kultur yang harus didalami terhadap penyebab kemiskinan di kota Padang Panjang.

2. Validitas Data kemiskinan

Satu data pengentasan kemiskinan merupakan suatu keharusan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam penyusuanan kebijakan pengentasan keiskinan bermuara dari ketidak validan data penduduk miskin yang dimiliki.

Dalam pengentasan kemiskinan di Kota Padang Paanjang dalam beberapa tahun terakhir mengacu kepada Data DTKS dan pada Tahun 2022 menggunakan dat P3KE dan pada akhir tahun 2023 juga muncul data Regsosek yang di keluarkan oleh Bappenas.

Pendataan yang dilakukan melalui data P3KE sedangkan dalam pengentasan kemiskinan dilakukan menggunakan data DTKS. Hal ini menyebabkan kesimpangsiuran dalam pengelolaan data kemiskinan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap arah kebijakan pengentasan kemiskinan.

3. Minimnya Lapangan Usaha

Keterbatasan lahan dan minimnya investasi di Kota Padang Panjang menyebabkan rendahnya serapan tenaga kerja di Kota Padang Panjang, sehingga membutuhkan upaya lain dalam penanggulangan kemiskinan, Pada akhirnya pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan hanya dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam penanggulangan kemiskinan.

4. Koordinasi dan Keserempakan Aksi Penanggulangan Kemiskinan.

Penanganan kemiskinan melibatkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat sipil, untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan strategi penanganan kemiskinan secara efektif. Koordinasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, mencegah tumpang tindih, dan memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan saling mendukung.

Dalam penanganan kemiskinan di Kota Padang Panjang koordinasi masih perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan.

Salah satu penyebab lemahnya koordinasi dalam penanganan kemiskinan adalah permasalahan belum terwujudnya satu data dalam pengentasan kemiskinan, sehingga banyak permasalahan yang muncul dari ketidaksamaan data, mulai dari sulitnya menemukan profil dan permasalahan kemiskinan, kessalahan dalam proses perencanaan, tumpang tindih penanganan bantuan serta yang paling fatal adalah sulitnya mengukur capaian dari pelaksanaan aksi pengentasan kemiskinan.

5. Metode dan Ukuran dalam Penentuan Penduduk Miskin

Metode penentuan penduduk miskin yang digunakan adalah mengukur penduduk berdasarkan garis kemiskinan, metode ini adalah metode tunggal yang digunakan. Mengingat kemiskinan merupakan hal yang bersifat multidimensi, maka garis kemiskinan belum dapat menggambarkan kondisi kemiskinan secara keseluruhan, sehingga agak sulit menggambarkan capaian upaya kemiskinan dengan baik.

Sasaran ketiga ”Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting” dengan indikator ”Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting”. Faktor pendorong dalam pelaksanaan kegiatan dan realisasi capaian kegiatan Penurunan Stunting ini adalah semakin tingginya tingkat kepedulian seluruh pemangku kepentingan dalam penurunan stunting di Kota Padang Panjang.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di atas, kendati capaian sudah sampai pada taraf maksimum, akan tetapi masih ada hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam penurunan stunting, diataranya :

1. Pengetahuan Keluarga

Masyarakat kurang memperhatikan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari kepedulian terhadap Pemberian Tablet Tambah darah (TTD) sangat perpengaruh terhadap kondisi tubuh Tanpa disadari, penyebab stunting pada dasarnya sudah bisa terjadi sejak anak berada di dalam kandungan. Pada tahun 2023 cakupan, Sebab sejak di dalam kandungan, anak bisa jadi mengalami masalah kurang gizi. Penyebabnya, adalah karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi seperti makanan berprotein tinggi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut memengaruhi kondisi malnutrisi janin. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan inilah yang juga bisa menjadi penyebab terbesar kondisi stunting pada anak

2. Keterbatasan Penelitian
3. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD), dalam hal ini masih lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan sekolah, sehingga pemberian TTD ke sekolah belum maksimal
4. Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) Belum masuk program rutin, TTD hanya diberikan pada catin yang terindikasi anemia
5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima Belum semuanya terakomodir dalam memperoleh bantuan untuk PUS masyarakat Miskin dan kurangnya pengetahuan PUS tentang fungsi dan manfaat kontasepsi
6. Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan, Kurangnya pengetahuan keluarga tentang Stunting
7. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak, - Rumah tangga masih menggunakan sumur gali untuk keperluan minum dengan tingkat risiko cemaran tinggi, - Masih ada masyarakat yang masih enggan untuk menyambungkan ke jaringan perpipaan terkait masalah biaya, - Warga yang masih buang sampah sembarangan menjadi penyebab tercemarnya air tanah

8. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak

   Masih ada masyarakat yang enggan untuk melakukan sambungan air limbah ke IPAL Komunal yang dibangun (a) Untuk pembiayaan perawatan terhadap sarana IPAL yang telah dibangun, belum ada swadaya / iuran dari masyarakat, (b)Tangki septik masih banyak mengalami kebocoran dan tidak memenuhi standar seperti kedalaman dan jarak dengan sumber air tanah

Tindakan pencegahan stunting tentu lebih bijak dilaksanakan oleh semua orang di lingkungannya, terutama yang terdapat anak balita dan pasangan usia muda terhadap kemungkinan terjadinya stunting, daripada harus melakukan upaya penanganan setelah stunting itu terjadi. Biaya pencegahan stunting tentu lebih murah dan dampaknya tentu akan lebih terkendali, daripada apabila sudah terjadi stunting. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting:

1. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil

Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Lembaga kesehatan Millenium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat nan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan.

2. Beri Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan

Veronika Scherbaum, ahli nutrisi dari Universitas Hohenheim, Jerman, menyatakan ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI Eksklusif selama enam bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan.

3. Dampingi ASI Eksklusif dengan Makanan Pendaping Air Susu Ibu (MPASI) sehat

Ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. Konsultasikan dulu dengan dokter.

4. Terus memantau tumbuh kembang anak

Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si Kecil secara berkala ke Posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya.

5. Selalu jaga kebersihan lingkungan

Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Harvard Chan School menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia.

3.1.2. Analisis Efisiensi Penggunaaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengmbangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa (a) Sumber Daya Manusia yang kompeten, (b) Sumber Dana yang mencukupi, dan (c) Sarana dan Prasarana yang memadai.

Tabel 3.6

Analisis Efisiensi Sumber Daya

	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
1.	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
2.	Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
3.	Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan, masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk melihat capaian realisasi keuangan maka ada beberapa sasaran strategis yang dapat di rangkum dan dijadikan sebagai ukuran, yaitu :

Tabel 3.5
Tabel Realisasi Anggaran
BAPPEDA Tahun Anggaran 2023

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	*Realisasi (Rp)*	*Serapan Dana %*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	BAPPEDA	**5.843.607.603**	**5.626.367.708**	**96,28%**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.351.268.003**	**5.626.367.708**	
A.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.188.181.748**	**4.113.457.951**	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.188.181.748	4.113.457.951	98,22%
B.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**590.543.800**	**548.977.603**	
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.977.700	3.818.000	95,99%
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.746.400	49.899.930	89,51%
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.020.750	10.315.900	64,39%
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	514.798.950	484.943.773	94,20%
C.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.000.000**	**17.522.500**	
6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	17.522.500	87,61%
D.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**208.739.555**	**186.046.736**	
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.600.000	86,67%
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.197.955	21.572.373	63,08%
9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.541.600	161.874.363	94,36%
E.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**343.802.900**	**324.276.587**	
10.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	188.562.900	172.638.987	91,56%
11.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.060.000	18.494.600	87,82%
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.180.000	133.143.000	99,23%
II.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**340.502.800**	**305.762.241**	
F.	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**264.963.000**	**240.805.890**	
13.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	46.667.100	45.100.620	96,64%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	218.295.900	195.705.270	89,65%
H.	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**7.144.000**	**4.928.800**	
15.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	7.144.000	4.928.800	68,99%
I.	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**68.395.800**	**60.027.551**	
16.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	68.395.800	60.027.551	87,76%
III.	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**101.797.050**	**89.022.650**	
I.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**51.623.000**	**43.516.550**	
17.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16.824.500	13.815.300	82,11%
18.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencana-an Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34.798.500	29.701.250	85,35%
J.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**14.999.750**	**13.015.100**	
19.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	14.999.750	13.015.100	86,77%
K.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**35.174.300**	**32.491.000**	
20.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	35.174.300	32.491.000	92,37%
IV.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**50.039.750**	**41.301.440**	
L.	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**50.039.750**	**41.301.440**	
21.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	50.039.750	41.301.440	82,54%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 dengan realiasasi keuangan Rp.5.626.367.708,- (96,28%).

BAB IV
PENUTUP

Secara kuantitatif, kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, dengan target 100,00% dan realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan capaian kinerja keuangan mencapai 96,28%. Dari sisi keuangan kami juga merencanakan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan untuk sasaran yang dicapai dapat dilihar sebagai berikut : Pertama, Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah, target 73%; realisasi 68,75%; dan capaian 94,18%. Sasaran ini belum mencapai target disebabkan antara lain sebagian besar data yang dipakai masih data tahun lalu karena data tahun 2023 sebagian besar belum rilis. Dari indikator 30 data sasaran daerah hanya 8 data yang sudah ada untuk tahun 2023, dan 22 data belum keluar.

Kedua, Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dengan indokator Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, target 96,37%; realisasi 100,00% ; dan capaian 103,77%. Sasaran ini melebihi target karena indikator sub kegiatan pada Renja OPD terkait program penanggulangan kemiskinan sudah sesuai dengan indikator sub kegiatan pada RKPD OPD terkait program penanggulangan kemiskinan.

Ketiga, Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting, target 100,00%; realisasi 100,00%; dan capaian 100,00%.Sasaran ini sesuai target karena indikator sub kegiatan pada Renja OPD terkait program penurunan stunting sudah sesuai dengan indikator sub kegiatan pada RKPD OPD terkait program penurunan stunting

Dalam rangka menerapkan prinsip *Good Governance*, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, masih sangat diperlukan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders*, khususnya konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan sebagaimana telah direncanakan dan disusun serta dituangkan dalam dokumen perencanaan, sehingga capaian kinerja kegiatan dapat diukur keberhasilannya.

Padang Panjang, 4 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RUSDIANTO, S.IP MM.

Pembina Utama Muda/NIP. 19640402 198602 1 003

Lampiran

Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2023
BAPPEDA Kota Padang Panjang

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentase rencana kerja sebelas pada seluruh daerah	75,00%	19,80%			19,80%	26,40%		
2	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	80,37%	16,98%			16,98%	21,12%		
3	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program pemerintah daerah	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program pemerintah daerah	58,00%	41,0%			41,0%	70,69%		

Padang Panjang, 15 Mei 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RUSDIANTO, S.IP, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196404021982021 003

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id – Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 2 Mai 2023
Agenda Rapat : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV atas program, kegiatan dan sub kegiatan serta Capaian Rencana Aksi Internal BAPPEDA Tahun ini
Peserta Rapat : ASN di lingkungan BAPPEDA Kota Padang Panjang

Kesimpulan Rapat :

1. Realisasi sub kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2022 secara fisik mencapai 99,17% dengan realisasi keuangan Rp.6.028.554.487,- (93,57%) dari total anggaran Rp.6.443.037.790,-.
2. Realisasi fisik sub kegiatan hamper semuanya mencapai 100%, namun hanya sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sisnergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia hanya 75%.
3. Adapun realisasi keuangan pada sub kegiatan yang tidak mencapai 80% yakni
   a. Penyediaan barang cetak dan penggandaan (52,27%), dimana belanja akan disesuaikan dengan kebutuhan fotocopy dan cetak
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (69,50%), dimana belanja akan disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan laptop, PC, printer dan peralatan kantor lainnya
   c. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD (48,64%), dimana ada sisa anggaran Honorarium narasumber Rp.3.000.000,-
   d. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (74,35%), dimana ada sisa anggaran Belanja makan minum Rp.2.242.600), Belanja perjalanan dinas Rp.9.525.600,-
   e. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (65,41%), dimana ada sisa anggaran Belanja makan minum Rp.10.331.550,-, Honorarium narasumber Rp.5.750.000,-, Belanja perjalanan dinas Rp.18.042.350,-
   f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (73,41%), dimana ada sisa anggaran Belanja makan minum Rp.8.472.625,-

a. Demikian dapat disampaikan beberapa informasi dari rapat tersebut.

Mengetahui :
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 19640402 198602 1 003

Notulis,

FALAHUDDIN, S.A.P
NIP. 19870503 200902 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id – Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa / 2 Mai 2023
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan I atas program, kegiatan dan sub kegiatan serta Capaian Rencana Aksi Internal BAPPEDA Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN			
1	Rustianto		1			
2	Agus Saidah	Sekretaris Bappeda			2	
3	Jamaroh	Kasi Litbang	3			
4	Rini Salmiyanti	Kasi Pelcip			4	
5	Enny Hafni	Kasi ESDAI	5			
6	Fitriani	Kasi Sosbud			6	
7	Emma Z	Fungsional	7			
8	Falahuddin	Perencana Ahli Muda			8	
9	Dan Rahmi H	F. Perencana	9			
10	Negeri Wijayanto	Peneliti			10	
11	Heriyati N	Analis Keuangan	11			
12	Indra Yuwandi	Analis			12	
13	Yusmaili	F. Perencana	13			
14	Agril Afrizi	Perencana AM			14	
15	Antoni Arif	Perencana AM	15			

Padang Panjang, 2 Mai 2023
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 19640402 198602 1 003

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA CAPAIAN RENCANA AKSI INTERNAL BAPPEDA TAHUN 2023
SELASA, 2 MAI 2023

Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2023
BAPPEDA Kota Padang Panjang

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi I	Realisasi II	Realisasi III	Realisasi IV	Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran	73,50%	12,60%	12,65%			32,75%	45,79%		
2.	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program pembangunan	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	99,37%	26,96%	6,75%			33,72%	35,00%		
3.	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	100,00%	41,30%	27,00%			68,30%	68,00%		

Padang Panjang, 3 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RUSDIANTO, S.IP, MM
Pembina Utama Muda NIP. 19640402 198602 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id – Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Senin / 3 Juli 2023
Agenda : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II atas program, kegiatan dan sub kegiatan serta Capaian Rencana Aksi Internal BAPPEDA
Peserta : ASN di lingkungan BAPPEDA Kota Padang Panjang

Kesimpulan Rapat :

1. Evaluasi kinerja kali ini untuk Semester I atau Triwulan II Tahun 2023 disampaikan pada saat Pelaksanaan Apel Pagi, bertindak sebagai Pembina Apel Kepala BAPPEDA dan menyampaikan informasi terkait evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disela-sela amanat apel.
2. Realisasi sub kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2023 untuk Semester I ini realisasi fisik mencapai 44,79% dengan realisasi keuangan Rp.2.820.519.399,- (45,61%) dari total anggaran Rp.6.183.475.120,-.
3. Sesuai Rencana Realisasi Fisik dan Keuangan yang telah ditetapkan di awal tahun, untuk Semester I atau bulan Juni ditetapkan rencana fisik sebesar 51,54% dan keuangan Rp.3.183.313.811,- (51,48%).
4. Secara fisik mengalami keterlambatan sebesar 6,75% dan kekurangan keuangan Rp.362.794.412,- (5,87%)
4. Secara umum keterlambatan dikarenakan ada 4 (empat) Sub Kegiatan yang dihilangkan pada Pergeseran Recofusing pada bulan Mei 2023, yakni :
   a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
   b. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
   d. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

   Jadi 4 (empat) sub kegiatan dimaksud masih menjadi pembagi dalam pelaporan evaluasi kinerja yang disusun setiap bulan.
5. Demikian dapat disampaikan beberapa informasi dari rapat tersebut.

Mengetahui :
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 19640402 198602 1 003

Notulis,

FALAHUDDIN, S.A.P
NIP. 19870303 200902 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id – Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Senin / 3 Juli 2023
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II atas program, kegiatan dan dan sub kegiatan serta Capaian Rencana Aksi Internal BAPPEDA Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN			
1	Rusdianto	Kepala	1			
2	Argus Saadan	Sekban			2	
3	Rini Selmirawati	Bid. PNTIS	3			
4	Hafizal	perencana ahli muda			4	
5	Partini	Kasubag TU	5			
6	Jamardi	Kabid Litbang			6	
7	Bagoes Wiguna	Perencana Sih	7			
8	Falahuddin	Perencana Ahli Muda			8	
9	Dwi Rahmi	Perencana Ahli Muda	9			
10	Indra Virawati	Perencana			10	
11	Lili K	Perencana	11			
12	Mesnawati	Ahli Madya			12	
13	Fadhli	JFP	13			
14					14	
15			15			

Padang Panjang, 2 Mai 2023
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 19640402 198602 1 003

DOKUMENTASI EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA CAPAIAN RENCANA AKSI INTERNAL BAPPEDA TAHUN 2023
SENIN, 2 JULI 2023

Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2023
BAPPEDA Kota Padang Panjang

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi I	Realisasi II	Realisasi III	Realisasi IV	Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentase rata-rata kesesuaian sasaran daerah	51,00%	19,80%	12,85%	11,80%		44,35%	60,75%		
2.	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	96,37%	26,98%	8,75%	22,17%		56,89%	59,00%		
3.	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program percepatan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program percepatan stunting	100,00%	41,00%	27,00%	20,00%		88,00%	88,00%		

Padang Panjang, 2 Oktober 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
RUSDIANTO, S.IP, MM
Pembina Tk.I / IV/b NIP. 19640402 198602 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id – Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Senin / 2 Oktober 2023
Agenda : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan III atas program, kegiatan dan sub kegiatan serta Capaian Rencana Aksi Internal BAPPEDA
Peserta : ASN di lingkungan BAPPEDA Kota Padang Panjang

Kesimpulan Rapat :

1. Evaluasi kinerja kali ini untuk Triwulan III Tahun 2023 keadaan 30 September 2023 disampaikan pada saat Pelaksanaan Apel Pagi, bertindak sebagai Pembina Apel Kepala BAPPEDA dan menyampaikan informasi terkait evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disela-sela amanat apel.
2. Realisasi sub kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2023 untuk Triwulan III ini realisasi fisik hanya mencapai 60,75% dengan realisasi keuangan Rp.3.649.186.069,- (59,02%) dari total anggaran Rp.6.183.475.120,-.
5. Sesuai Rencana Realisasi Fisik dan Keuangan yang telah ditetapkan di awal tahun, untuk Triwulan III atau bulan September ditetapkan rencana fisik sebesar 73,38% dan keuangan Rp.4.647.810.628,- (75,17%).
6. Secara fisik mengalami keterlambatan sebesar 12,63% dan kekurangan keuangan Rp.998.624.559,- (16,15%)
7. Secara umum keterlambatan dikarenakan ada 4 (empat) Sub Kegiatan yang dihilangkan pada Pergeseran Recofusing pada bulan Mei 2023, yakni :
   a. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
   b. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
   d. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

   Jadi 4 (empat) sub kegiatan dimaksud masih menjadi pembagi dalam pelaporan evaluasi kinerja yang disusun setiap bulan.
8. Demikian dapat disampaikan beberapa informasi dari rapat tersebut.

Mengetahui :
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang
RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 19640402 198602 1 003

Notulis,
FALAHUDDIN, S.A.P
NIP. 19870303 200902 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id – Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Senin / 2 Oktober 2023
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II atas program, kegiatan dan dan sub kegiatan serta Capaian Rencana Aksi Internal BAPPEDA Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN			
1	Rusdianto	Kaban	1			
2	Arque Soadez	Sekban			2	
3	Jamarda	Kabid Litbang	3			
4	Yudha Vimzal	Kasi			4	
5	Fauzi	Kasi Litbang	5			
6	Yogga Ongguna	Fungsional			6	
7	Nur Sukmawati	Bid. PAREK	7			
8	Asril Hadi	—			8	
9	Dwika H	Fungsional	9			
10	Fevi	—			10	
11	Fadli Anpman	—	11			
12	Falahuddin	Perencana			12	
13	Zika Febriyanti	Analis Keu	13			
14	Ade Suryani	Staf			14	
15	Debora S. Panjaitan	Subbag Umpeg	15			

Padang Panjang, 2 Oktober 2023
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang
RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 19640402 198602 1 003

DOKUMENTASI EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA CAPAIAN RENCANA AKSI INTERNAL BAPPEDA TAHUN 2023
SENIN, 2 OKTOBER 2023

Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2023
BAPPEDA Kota Padang Panjang

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi						Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	73,00%	19,80%	12,89%	11,55%	27,35%			71,72%	98,25%	Untuk pencapaian sasaran tahun 2023 belum ada untuk sasaran tahun yang berjalan	untuk semestinya mulai dilaksanakan pada tahun 2023 untuk sasaran daerah tahun 2022
2.	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	96,37%	26,98%	6,75%	22,17%	44,11%			100,10%	103,77%		
3.	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	100,00%	41,00%	27,60%	20,05%	12,35%			100,70%	100,70%		

Padang Panjang, 2 Januari 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RUSDINAYE, S.P, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196402 28002 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id – Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Jumat / 29 Desember 2023
Agenda : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV atas program, kegiatan dan sub kegiatan serta Capaian Rencana Aksi Internal BAPPEDA
Peserta : ASN di lingkungan BAPPEDA Kota Padang Panjang

Kesimpulan Rapat :

1. Evaluasi kinerja untuk Triwulan IV Tahun 2023 disampaikan pada hari terakhir di tahun 2023 yang dipimpin oleh Sekretaris BAPPEDA dan menyampaikan informasi terkait realisasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Realisasi sub kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2023 ini realisasi fisik telah tercapai 100,00% dengan realisasi keuangan Rp.5.626.367.708,- (96,28%) dari total anggaran Rp.5.843.607.603,-.
3. Untuk silpa sebesar Rp.217.239.895,-. Namun secara keseluruhan secara fisik kegiatan sudah terlaksana dengan baik 100,00%.
4. Demikian dapat disampaikan beberapa informasi dari rapat tersebut.

Mengetahui :
SEKRETARIS
BAPPEDA Kota Padang Panjang

ARGUS SAADAH, S.Sos M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

Notulis,

RIKA FEBRIYANTI, SE
NIP. 19770221 200701 2 003

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id – Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat / 29 Desember 2023
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja atas program, kegiatan dan dan sub kegiatan serta Capaian Rencana Aksi Internal BAPPEDA Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Argus Saadah	Sekwan	1	
2	Rika Febriyanti			2
3	Nur Casahcani	Kabid Nelitbang	3	
4	Dedora S. Panjaitan	Sekretaris Umpeg		4
5	Emma Burrianti	Perencana	5	
6	Asril Hadi	Perencana		
7	Agata Gryana	Perencana	7	
8	Zadhli	JFP		8
9	Indra Virwali	Analis	9	
10	Ilwirl	Analis Sedud		10
11	Ade Suryani	SHF	11	
12	Heru Kotu Kua	Perencana		12
13	Rommerita	SHF	13	
14	Tara Darmawan	Staf		14
15	[illegible]	[illegible]	15	

Padang Panjang, 29 Desember 2023
SEKRETARIS
BAPPEDA Kota Padang Panjang

ARGUS SAADAH, S.Sos M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

DOKUMENTASI EVALUASI PENGUKURAN KINERJA ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA CAPAIAN RENCANA AKSI INTERNAL BAPPEDA TAHUN 2023
JUMAT, 29 DESEMBER 2023